

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD), PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI STAF
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Disusun Oleh:

ABDUL AZIIZ RAMADHANI
B 200 140 367

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD), PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI STAF
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ABDUL AZIIZ RAMADHANI

B 200 140 367

Telah diperiksa dan disetujui oleh
Dosen Pembimbing



Dra. Rina Trisnawati, M. Si, Ak., P.hD., C.A
NIK.641/0605016701

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD), PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI STAF
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta)

Yang ditulis oleh:

ABDUL AZIIZ RAMADHANI
B 200140367

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis , 5 April 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Dewan Penguji :

1. Dra. Rina Trisnawati, M. Si, Ak., P.hD., C.A ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Eko Sugiyanto, M.Si. ()
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Shinta Permata Sari, S.E., M.M. ()
(Anggota 2 Dewan Penguji)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Dr. Syamsudin, MM

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 05 April 2018

Penulis



Abdul Aziiz Ramadhani
B200140367

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD), PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI
STAF TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

Abstrak

Pemerintah diharuskan membuat laporan keuangan yang berkualitas agar para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) dapat memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Karena jika laporan keuangan pemerintah buruk dapat menimbulkan implikasi yang negatif, salah satunya yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat, penyajian laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan kompetensi sumber daya manusia, *sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern* dan *kompetensi staf* terhadap *kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. Sampel penelitian yang digunakan adalah 33 kantor SKPD Kota Surakarta. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*path analysis*) dengan tingkat signifikansi 5 persen, yang diolah menggunakan program *Statistical Package for Social Science (SPSS)* Versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan sedangkan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Staf tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Staf

Abstract

Governments are required to produce qualified financial statements to enable users of financial statements (stakeholders) to understand the information contained there. The presentation of financial statements should meet the qualitative characteristics as required in Government Regulation No. 71 of 2010 that is relevant, reliable, comparable and understandable, therefore if the government makes poor financial statements, it could cause negative implications such as reducing public trust. This study aims to examine the influence of the application of human resource competence, regional financial accounting system, utilization of information technology, internal control system and staff competence towards the quality of regions financial statements. The sample used in this research is taken from 33 Regional Government Agencies in Surakarta. Sampling method used in this research is purposive sampling method. The

analysis used in this research is the analysis of multiple linier regression (path analysis) with 5 percent level of significance, which is processed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 20 program. The results showed that Human Resource Competence and Regional Financial Accounting System affect the Quality of Financial Statements while the Internal Control System, Utilization of Information Technology and Staff Competence has no effect toward the Quality of Financial Statements.

Keywords: *Human Resource Competence, Utilization of Information Technology, Quality of Financial Statement, Regional Financial Accounting System, Internal Control System, and Staff Competence*

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal (Mahsun, Sulistiyowati dan Purwanugraha, 2011:115). Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara atau daerah selama suatu periode. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Namun seperti halnya sektor swasta, sektor publik juga dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan formal seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas laporan keuangan. Untuk itu, penyajian laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki apabila memiliki keempat karakteristik kualitatif diatas, hal ini merupakan prasyarat normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui, dan diaudit secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur. Hal ini

berarti bahwa kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Pemerintah berkewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai alat pengendalian, evaluasi kerja, sebagai salah satu pertanggungjawaban dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu pemerintah diharuskan membuat laporan keuangan yang berkualitas agar para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) dapat memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Karena jika laporan keuangan pemerintah buruk dapat menimbulkan implikasi yang negatif, salah satunya yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana publik (pemerintah) dan kualitas keputusan menjadi buruk.

Masih banyak fenomena laporan keuangan pemerintah daerah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih terdapat penyimpangan-penyimpangan, hal ini mendorong meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk menerapkan akuntabilitas publik yaitu melalui suatu media pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang dilaksanakan secara periodik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan daerah agar informasi yang diperoleh dapat berkualitas.

Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas membutuhkan SDM yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Menurut Ihsanti (2014) kompetensi SDM adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. SDM merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini adanya kompetensi SDM mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati dkk, 2014).

Tuntutan masyarakat kepada pemerintahan adalah dihasilkannya laporan keuangan yang telah memenuhi keempat karakteristik kualitas laporan keuangan

tersebut. Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik, salah satunya dengan menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2004 dan selanjutnya di ganti dengan PP NO 71 Tahun 2010, yang bertujuan supaya pemerintah daerah dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabilitas setiap rupiah dana yang di terima dari masyarakat. Sebagaimana pengertian dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian dari prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dapat di lakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Teknologi informasi merupakan komponen penting bagi keberhasilan organisasi, tidak terkecuali organisasi disektor pemerintahan. Untuk mewujudkan kinerja pemerintah yang baik, dilakukan upaya dengan menerapkan aplikasi tentang pengelolaan keuangan negara atau daerah. Proses penerapan aplikasi ini membutuhkan suatu sistem informasi keuangan. Sistem informasi merupakan serangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna (Cindy and Ros, 2014).

Adapun Sistem Pengendalian Intern yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,keandalanpelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadapperaturan perundang-undangan. Unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi:

lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau existensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh As Syifa Nurillah (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambah satu variabel yaitu Kompetensi Staf. Penelitian ini akan dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, oleh karena itu judul penelitian ini adalah “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Staf Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

2. METODE

2.1 Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel

Objek dalam penelitian ini ialah Badan dan Dinas dari SKPD yang ada di Kota Surakarta yaitu berjumlah 33 kantor. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah pejabat struktural dan seluruh aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan di masing-masing Badan dan Dinas pada SKPD yang diambil secara *purposive sampling*.

Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan di masing-masing Dinas pada SKPD,
2. Memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan.
3. Pegawai yang bersedia mengisi kuesioner.

2.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

2.2.1 Variabel Dependen

2.2.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

2.2.2 Variabel Independen

2.2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional, sumber daya manusia mencakup tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman dan pelatihan. Sumber daya manusia harus baik karena sumber daya manusia yang baik akan menunjukkan kapasitas sumber daya yang baik juga. Manusia bertanggung jawab untuk mengelola organisasi, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan elemen penting dan selalu ada dalam organisasi (Hullah, dkk. 2012).

2.2.2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Permendagri nomor 59 tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) didefinisikan sebagai: “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.” Demi penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang berkualitas, maka kepala daerah menentukan sistem akuntansi pemerintah daerah berdasarkan pada peraturan daerah mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

2.2.2.3 Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Menurut Jogiyanto (1995:7), teknologi merupakan alat yang digunakan individual dalam penyelesaian tugas mereka, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, data) dan penggunaan jasa pendukung (training) yang memberikan panduan penggunaan dalam menyelesaikan tugas.

2.2.2.4 Sistem Pengendalian Intern

Peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Rai (2008:283) mendefinisikan sistem pengendalian intern secara ringkas yaitu kebijakan dan

prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.

2.2.2.5 Kompetensi Staf

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau existensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 7 tahun 2013 menyatakan bahwa Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda yang bertujuan untuk menguji apakah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, keserakahan, kebutuhan dan pengungkapan berpengaruh terhadap *academic fraud*. Sebelum dilakukan uji hipotesis maka dilakukan uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengukur seberapa handal kuesioner dapat digunakan dan setelah pengujian tersebut dilakukan melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji ketetapan uji f, uji determinasi (R^2), dan uji t. Setelah uji asumsi klasik dan uji ketetapan maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis, model persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = kualitas laporan keuangan

α = konstanta

β_1 = koefisien regresi sumber daya

β_2 = koefisien regresi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

β_3 = koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi

β_4 = koefisien regresi sistem pengendalian intern

β_5 = koefisien regresi kompetensi staf

X_1 = variabel sumber daya

X_2 = variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

X_3 = variabel pemanfaatan teknologi informasi

X_4 = variabel sistem pengendalian intern

X_5 = variabel kompetensi staf

variabel e = variabel pengganggu

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Teknik yang digunakan adalah pearson correlation moment. Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan rumus korelasi product moment person, jika rhitung > rtabel berarti item valid. Sebaliknya jika rhitung < rtabel berarti item tidak valid (Ghozali, 2011:47).

3.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrument penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien Cronbachs Alpha. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut handal atau reliabel.

3.3 Uji Normalitas

Suatu penelitian yang menggunakan model regresi membutuhkan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Kriteria pengujian yang digunakan adalah p-value, apabila nilai p-value > 0,05, maka dapat dinyatakan

bahwa data berdistribusi normal, dan apabila jika p -value < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas Data

	Kolmogorov-Smirnov	p -value	Keterangan
Unstandardized Residual	0,962	0,313	Data terdistribusi Normal

Sumber: Data primer diolah, 2018

Dari tabel 3 diatas diketahui bahwa kolmogorov smirnov adalah 0,962 dengan probabilitas (p) 0,313. Perbandingan antara probabilitas dengan taraf signifikansi 5% nilai hitung probabilitas adalah 0,313 sehingga dapat dinyatakan bahwa data pada model regresi terdistribusi normal.

3.4 Uji Multikolinieritas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	Keterangan
SDM	0,404	2,475	Tidak terjadi multikolinieritas
SAKD	0,367	2,727	Tidak terjadi multikolinieritas
TI	0,349	2,868	Tidak terjadi multikolinieritas
SPI	0,280	3,574	Tidak terjadi multikolinieritas
ST	0,378	2,645	Tidak terjadi multikolinieritas
SDM	0,404	2,475	Tidak terjadi multikolinieritas
SAKD	0,367	2,727	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan pada tabel 4. menunjukkan bahwa nilai VIF ketujuh variabel independen berada sekitar 1 sampai 10, demikian juga hasil nilai tolerance mendekati 1 atau di atas 0,1. Maka dapat disimpulkan model regresi tersebut bebas multikolinearitas.

3.5 Uji Heterokedastisitas

Tabel 5
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
SDM	0,067	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SAKD	0,959	Tidak terjadi heteroskedastisitas
TI	0,659	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SPI	0,804	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ST	0,311	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SDM	0,067	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SAKD	0,959	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan hasil output dengan menggunakan metode uji spearman's rho dapat dinyatakan tidak terjadi masalah heteroskesiditas dikarenakan setiap variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05.

3.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2011), besaran yang sering di gunakan untuk menentukan taraf nyata dinyatakan dalam %, yaitu: 1% (0,01), 5% (0,05), 10% (0,1). Peneliti menggunakan taraf signifikansi bertingkat, seandainya hasil signifikansi berada di daerah hasil 0,0 – 0,01 maka hasil tersebut berada di daerah signifikansi 1% , apabila hasil signifikansi berada di daerah hasil 0,01 – 0,05 maka hasil tersebut berada di daerah signifikansi 5%, dan apabila hasil signifikansi berada di daerah hasil 0,05 – 0,1 maka hasil tersebut berada di daerah signifikansi 10%. Keputusan H_A diterima apabila hasil signifikansi berada dalam daerah taraf signifikasi tersebut

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig.	Keterangan
(Constant)	11,043	3,447	0,001	
SDM	0,446	6,987	0,000	Signifikan
SKAD	0,273	2,256	0,026	Signifikan
TI	0,043	0,335	0,738	Tidak Signifikan
SPI	-0,122	-0,982	0,328	Tidak Signifikan
ST	0,125	0,778	0,438	Tidak Signifikan

Sumber: Data primer diolah, 2018

$$\text{LKPD} = 11,043 + 0,446\text{SDM} + 0,273\text{SKAD} + 0,043\text{TI} - 0,122\text{SPI} + 0,125\text{ST} + e$$

Interpretasi dari masing-masing koefisien variabel adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 11,043 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kompetensi staf, diasumsikan konstan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat.
- b. Koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia menunjukkan koefisien yang positif yakni sebesar 0,446 dengan demikian dapat diketahui apabila kompetensi sumber daya manusia meningkat maka kualitas laporan keuangan juga meningkat.
- c. Koefisien regresi sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan koefisien yang positif yaitu sebesar 0,273 dengan demikian dapat diketahui apabila sistem akuntansi keuangan daerah meningkat maka kualitas laporan keuangan juga meningkat.
- d. Koefisien regresi teknologi informasi menunjukkan koefisien yang positif yakni sebesar 0,043 dengan demikian dapat diketahui apabila teknologi informasi meningkat maka kualitas laporan keuangan juga meningkat.
- e. Koefisien regresi sistem pengendalian intern menunjukkan koefisien yang negatif yakni sebesar -0,122 dengan demikian dapat diketahui apabila sistem pengendalian intern meningkat maka kualitas laporan keuangan menurun.
- f. Koefisien regresi kompetensi staf menunjukkan koefisien yang positif yakni sebesar 0,125 dengan demikian dapat diketahui apabila kompetensi staf meningkat maka kualitas laporan keuangan juga meningkat.

3.7 Uji Determinasi R^2

Hasil perhitungan untuk nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted- R^2 sebesar 0,588. Hal ini berarti bahwa 58,8% variasi variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kompetensi staf,

sedangkan sisanya yaitu 41,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

3.8 Uji F

Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan dengan program SPSS 20.0 diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni $35,828 > 2,720$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (α). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi staf berpengaruh secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan atau model sudah *fit of goodness*.

3.9 Uji t Parsial

1. Variabel kompetensi sumber daya manusia diketahui nilai t_{hitung} (6,987) lebih besar dari pada t_{tabel} (1,980) atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$ (α). Oleh karena itu, H_1 diterima, artinya variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah diketahui nilai t_{hitung} (2,256) lebih besar dari pada t_{tabel} (1,980) atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya $0,026 < 0,05$ (α). Oleh karena itu, H_2 diterima, artinya variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Variabel teknologi informasi diketahui nilai t_{hitung} (0,335) lebih kecil dari pada t_{tabel} (1,980) atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya $0,738 > 0,05$ (α). Oleh karena itu, H_3 ditolak, artinya variabel teknologi informasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
4. Variabel sistem pengendalian intern diketahui nilai t_{hitung} (-0,982) lebih kecil dari pada t_{tabel} (1,980) atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya $0,328 < 0,05$ (α). Oleh karena itu, H_4 ditolak, artinya variabel sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

5. Variabel kompetensi staf diketahui nilai t_{hitung} (0,778) lebih kecil dari pada t_{tabel} (1,980) atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya $0,438 < 0,05$ (α). Oleh karena itu, H_5 ditolak, artinya variabel kompetensi staf tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

3.10 Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 6,987 lebih besar dari t tabel sebesar 1,980 dan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 5% sehingga H_1 diterima artinya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil statistik menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini berarti semua aparatur yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi paham dan bisa menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pegawai dituntut untuk dapat memahami penyusunan laporan dengan menggunakan sisten dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga kurang memperhatikan latar belakang pendidikan pegawai.

3.11 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 2,256 lebih besar dari t tabel sebesar 1,980 dan nilai sig sebesar 0,026 lebih kecil dari 5% sehingga H_2 diterima artinya sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Jika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sudah diterapkan dengan baik oleh Dinas pada SKPD Surakarta, maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah pun akan semakin baik. Karena pada dasarnya sistem akuntansi adalah suatu kesatuan

yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Pemaparan tersebut didukung oleh Abdul Halim (2007 : 37) yang menyatakan, untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan akurat dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi tadi. Jadi jelas, bahwa untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai SAP harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula.

3.12 Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel teknologi informasi sebesar 0,335 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,980 dan nilai sig sebesar 0,738 lebih besar dari 5% sehingga H_3 ditolak artinya teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini dikarenakan pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya dapat mempertinggi efektifitas, menjawab kebutuhan informasi, meningkatkan kinerja, meningkatkan efisiensi aparatur pemerintah dalam mengerjakan pekerjaannya. Padahal pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke arah yang lebih baik.

3.13 Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel sistem pengendalian intern sebesar -0,982 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,980 dan nilai sig sebesar 0,328 lebih besar dari 5% sehingga H_4 ditolak artinya sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

. Hasil statistik menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini dikarenakan belum diterapkannya unsur-unsur sistem pengendalian intern dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah yang meliputi penguatan pengawasan, pemisahan tugas yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian sistem pengendalian intern yang sudah ada. Jadi, untuk mencapai kualitas laporan keuangan daerah yang baik, seharusnya unsur-unsur tersebut juga berjalan dengan baik.

3.14 Kompetensi Staf tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi staf tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel kompetensi staf sebesar 0,778 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,980 dan nilai sig sebesar 0,438 lebih besar dari 5% sehingga H_5 ditolak artinya kompetensi staf tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini dikarenakan pegawai pengelola akuntansi belum memiliki kemampuan secara optimal dalam melakukan penyusunan laporan keuangan daerah, serta belum maksimal dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini berarti H_1 diterima, karena diperoleh t_{hitung} sebesar 6,987 dan t_{tabel} sebesar 1,980 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$.
2. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini berarti H_2 diterima, karena

diperoleh t_{hitung} sebesar 2,256 dan t_{tabel} sebesar 1,980 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$.

3. Variabel teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini berarti H_3 ditolak, karena diperoleh t_{hitung} sebesar 0,335 dan t_{tabel} sebesar 1,980 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$.
4. Variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini berarti H_4 ditolak, karena diperoleh t_{hitung} sebesar -0,982 dan t_{tabel} sebesar 1,980 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$.
5. Variabel kompetensi staf tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini berarti H_5 ditolak, karena diperoleh t_{hitung} sebesar 0,778 dan t_{tabel} sebesar 1,980 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan memberikan saran yang bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menggunakan metode survey dengan wawancara langsung dalam pengisian kuesioner, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen seperti komitmen organisasi serta menambah sampel penelitian untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini.
3. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian lain atau dapat membandingkan dengan daerah lain sehingga cakupannya lebih luas untuk memperkuat hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2008. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN
- Agung, Rai I Gusti. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Grafindo
- Ahmad Ruky. 2004. *Sistem Manajemen Kinerja*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Alfian, M. (2015). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi SIMDA dan Kualitas Laporan Keuangan SKPD*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 16(1), 1-11.

- Andini Dewi dan Yusrawati. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I. 24 (1).
- Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Budiawan, Desiana Anugrah Dan Budi S. Purnomo. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Deddi Nordiawan (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Desiana, Desi. 2014. *Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas*. Skripsi. Bandung Universitas Widyatama
- Firdaus, SE, Dr. Nadirsyah, SE, M.Si, Ak, CA, Dr. rer. pol. Heru Fahlevi, SE, M.Sc. 2015. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh*. Jurnal Magister Akuntansi ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 4, No. 1, 45-54
- Fitriani, Irma Idnil. 2012. *Pelaksanaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Multijasa di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung*. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Harifan, Handriko. 2009. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah, Padang*. Skripsi Universitas Negeri Padang. Padang.
- Herawati N. T, Dewi L.D.S, Purnamawati, I.G.A. 2017. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keberhasilan Penerapan Sap Berbasis Akrua*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 Nomor 1)

- Hullah, R, Abdurrahman., dkk. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2000. Akuntabilitas dan Governance, Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip). Jakarta : LAN
- Jogiyanto HM. 1995. Analisis dan Disain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Yogyakarta : Andi Offset
- Kemenum nomor 7 tahun 2013.
- Kiranyanti, Ida Ayu Enny, dan Erawati, Ni Made Adi. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16. (2): 1290-1318. Issn:2302-8556. (diakses 1 pada tanggal 10 Desember 2016)
- Manaf, Iqlima A, Muhammad Arfan, dan Darwanis. 2014. “Pengaruh pemahaman tentang standar akuntansi pemer dan system engendalian intern terhadap proses reviu laporan keuangan pemerintah daerah oleh inspektorat dan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada inspektorat kabupaten/kota di provinsi aceh”. Banda Aceh. ISSN : 2302-0164. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. pp. 23- 35
- Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI
- Nagor Teuku Fahrian, Dr. Darwanis, M. Si, Ak, Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Ak. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Magister Akuntansi ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 4, No. 1, 72- 79
- Nugroho, Widjajanto. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Erlangga. Hal 89.
- Nurillah, As Syifa. (2014). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansikeuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah (studi empiris pada SKPD Kota Depok). Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

PP No 105 Tahun 2001

Permendagri nomor 59 tahun 2007

Rosalin, Faristina. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada Blu Di Kota Semarang). Skripsi Universitas Diponegoro : Semarang

Roviyantie, Devi. 2012. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.

Sapitri, N.M.T, Purnamawati, I.G.A. 2015. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Akuntansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. 3 (1).

Setyaningrum, Desy. 2016. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Soimah. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Skripsi. Universitas Bengkulu

Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten dan kota Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.

Sutaryo. 2011. Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Dengan E-Government System. <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id>

- Wahana Komputer, 2003. Konsep Jaringan Komputer Dan Pengembangan. Salemba Infotek
- Warren et al. (2005). Pengantar Akuntansi, Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat
- Wati, Kadek Desiana, et al. (2014) Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1) 2. 1.
- Wijayanti Ratna dan Handayani Nur. 2017. Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Implementasi Akuntansi AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 3, ISSN : 2460-0585
- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN), dalam Simposium Nasional Akuntansi XIII. 13-14 Oktober. Purwokerto.
- Yusniar, Darwanis, Abdullah Syukriy. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 5 (2), 100-115.
- Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas MuhMuria Kudus. Diunduh dari (http://eprints.umk.ac.id/602/10/skripsi_penuh.pdf)